



BPJS YOGYA TUNGGU PUSAT TERKAIT TUNGGAKAN RP 16 M

Akreditasi Bukan Syarat Utama Pencairan Klaim

UMBULHARJO (MERAPI) - Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Yogyakarta belum dapat memastikan kapan tunggakan klaim Rp 16 miliar ke RS Jogja akan dibayarkan lantaran terhambat proses akreditasi. Di sisi lain, Direktur Utama RS Jogja Ariyudi Yunita menyatakan dalam perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan, akreditasi bukan menjadi satu-satunya atau pokok utama syarat pencairan klaim.

Kepastian pembayaran klaim ke rumah sakit milik Pemkot Yogyakarta itu menunggu hasil konsultasi BPJS Kesehatan pusat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogya-

karta Dwi Hesti Yuniarti kepada wartawan, Jumat (2/8) mengatakan, penundaan pembayaran klaim RS Jogja salah satunya karena adanya kendala akreditasi yang dimiliki rumah sakit itu.

Sertifikat Akreditasi RS Jogja berakhir tanggal 20 Desember 2018 dan hingga 30 April 2019 belum dilaksanakan survei akreditasi, sehingga belum terbit sertifikat akreditasi yang baru.

"Akreditasi merupakan syarat mutlak bagi fasilitas kesehatan untuk dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Karena kendala akreditasi ini kami masih

belum bisa membayar klaim RSUD Kota Yogyakarta," kata Hesti kepada wartawan, Jumat (2/8).

Dia menjelaskan, klaim yang diajukan Rp 16 miliar itu adalah untuk pelayanan kesehatan yang dilakukan pada saat sertifikat akreditasi baru belum terbit yakni bulan Maret dan April. Namun demikian, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS Jogja untuk membahas hal tersebut. Termasuk berkonsultasi ke BPJS pusat mengenai pembayaran klaim bagi rumah sakit yang dalam proses akreditasi.

** Bersambung ke halaman 9*



MERAPI, TRI DARMIYATI
Direktur Utama RS Jogja Ariyudi Yunita memberikan klarifikasi terkait tunggakan BPJS Kesehatan.

Akreditasi

"Kami sudah berkonsultasi ke kantor pusat untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut apakah klaim dapat dibayarkan atau tidak. Saat ini persoalan yang dikonsultasikan sedang dalam pembahasan BPJS pusat, terangnya.

Dia menjelaskan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta dengan RS Jogja telah dilanjutkan kembali sejak tanggal 16 Mei 2019. Mengingat survei akreditasi di RS Jogja sudah dilakukan dan telah terbit Sertifikat Akreditasi RS yang baru. Tagihan klaim pelayanan kesehatan untuk bulan Mei dan Juni 2019 dari RS Jogja dengan total Rp 6,6 miliar sudah diterima BPJS Kesehatan Yogyakarta.

"Untuk Mei dan Juni klaim dari RSUD Jogja sudah kami terima dan diakui sebagai utang, tapi pembayarannya menunggu tanggal jatuh tempo, ujarnya.

Seperti diketahui, keuangan dan operasional Rumah Sakit milik Pemkot Yogyakarta, RS Jogja terancam terganggu. Pasalnya ada tunggakan klaim BPJS Kesehatan sebanyak Rp 16 miliar yang belum dibayarkan ke RS Jogja karena terhambat akreditasi. Untuk mengatasinya, operasional RS Jogja sementara ini dibantu dengan APBD Kota Yogyakarta.

Secara terpisah Direktur Utama RS Jogja Ariyudi Yunita menyatakan dalam perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan, akreditasi bukan menjadi satu-satunya atau pokok utama syarat pencairan klaim. Oleh sebab itu pihaknya tetap berharap tunggakan klaim Maret-April 2019 di RS Jogja tetap dibayar oleh BPJS Kesehatan.

Sambungan halaman 1

"Kalau akreditasi menjadi syarat utama, klaim Januari-Februari tak dibayar. Tapi kemarin klaim Januari-Februari tetap dibayar layanan PIKR (sistem aplikasi BPJS) di RS Jogja tetap dibuka, sehingga masih ada rujukan pasien BPJS ke RS Jogja. Kami tidak bisa menolak, papar Ariyudi dalam jumpa pers di Balaikota, kemarin.

Dia menyebut layanan PIKR sistem aplikasi BPJS Kesehatan di RS Jogja baru diputus pada 1-15 Mei 2019. Selama layanan kerja sama dihentikan itu, RS Jogja tetap memberikan pelayanan kesehatan sesuai amanah Pemkot Yogya tapi secara terbatas di antaranya untuk hemodialisa, kemoterapi dan kegawatdaruratan, pasien ICU dan lainnya yang sudah masuk di RS Jogja sejak April 2019. "Janji BPJS Kesehatan layanan itu tetap bisa diklaim," tegasnya.

Baru setelah sertifikat akreditasi ulang RS Jogja terbit, pelayanan dan sistem aplikasi BPJS Kesehatan kembali dibuka pada 16 Mei. Pihaknya menegaskan dengan adanya tunggakan klaim Rp 16 miliar yang belum dibayar tidak mempengaruhi operasional rumah sakit karena dibantu dengan APBD Pemkot Yogyakarta total Rp 11,7 miliar. Di samping itu juga terdapat pendapatan dari pasien umum di RS Jogja, asuransi lain dan pendapatan sah lainnya. Namun dia akunya 70 persen pasien RS Jogja adalah pasien BPJS Kesehatan.

"Yang terganggu pada jasa medis kepada mitra kami yang belum bisa dibayarkan. Kami sampaikan ke dokter-dokter mitra kami dan mereka bisa memahami. Pelayanan ke pasien tetap berjalan seperti biasa," pungkas Ariyudi.

(Tri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. RSUD (RS Jogja)			

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005